

Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)

La Ode Machdani Afala (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Muh. Tamar (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Murfi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: laodeafala@yahoo.com

Abstract

This paper on the role and position of the jurists in Iran Islamic government system and to investigate the implementation of the system of government in the Islamic Republic of Iran. In this research, descriptive research type use eksplanatif. In the view of the Shi'a Imami, there is a close connection between the concept of Imamate partner and the concept of Wilayah al-Faqih. Both are the successor to the prophetic mission of religion in order to preserve and manage the affairs of the world. The state becomes a tool and fortress as well as the retention erectly Sharia as a way of life of the people in achieving a happy life and Hereafter. Thus the State Islamic Republic of Iran to the wilayah al-faqih system has been institutionalized / institutionalization of religious values in the country's political structure.

Keywords: religion, state, politic

Abstrak

Tulisan ini mengenai peran dan kedudukan para fuqaha dalam sistem pemerintahan islam iran dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Republik Islam Iran. Dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian deskriptif eksplanatif. Di dalam pandangan kaum Syi'ah Imamiyah, terdapat kaitan yang sangat erat antara konsep Imamah dan konsep Wilayah al-Faqih. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Negara menjadi alat dan benteng pertahanan serta jaminan tetap tegaknya syariat sebagai pedoman hidup rakyat dalam mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dengan demikian Negara Republik Islam Iran dengan sistem wilayah al-faqih telah melakukan institusionalisasi/pelembagaan nilai-nilai agama dalam struktur politik negaranya.

Kata kunci: agama, Negara, politik

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan

pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Di zaman globalisasi dewasa ini, terlepas dari sistem politik dan pemerintahan yang dianutnya, Iran merupakan salah satu negara besar dalam percaturan dunia saat ini. Negara yang berani menentang kebijakan-kebijakan negara-negara dunia I (pertama) seperti Amerika Serikat dan sekutunya, negara yang termasuk maju di kawasan Asia Barat Daya dalam beberapa dekade melalui perkemba-

ngan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuannya mengembangkan nuklir, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada tingkat internasional dan visinya di dalam menegakkan keadilan dan perdamaian dunia menjadikan Iran sebagai patron beberapa negara di dunia sekaligus menjadi musuh baru bagi negara yang tidak sejalan dengan garis politiknya terutama negara Amerika Serikat dan sekutunya. Perkembangan negara Iran tersebut tidak lepas dari peran para pemimpin agama, yang menerapkan syariat Islam sebagai fondasi negara dan kehidupan rakyatnya. Perkembangan ini dimulai sejak Iran sendiri menganut sistem pemerintahan Islam pada tahun 1979, pasca revolusi terhadap pemerintahan monarki yang otoriter.

Secara rasional, keberadaan sebuah pemerintahan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam mengatur berbagai persoalan kehidupan manusia. Dalam artian manusia secara sosial tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, agar dalam kehidupannya dapat berjalan dengan teratur maka manusia membutuhkan sebuah pemerintahan untuk menciptakan keteraturan hidup ke dalam sebuah negara. Negara kemudian menjadi sebuah wadah untuk mencapai kesejahteraan.

Di abad pertengahan, pemerintahan di Eropa didominasi oleh bentuk monarki yang teokratik. Raja yang memerintah pada dasarnya hanyalah pelaksana kebijakan Paus sebagai penguasa tertinggi keagamaan (Khatolik Roma). Di era itu dikenal dalam sejarah sebagai Abad Kegelapan. Abad kegelapan yang menyelimuti Eropa diwarnai oleh kekuasaan pemuka agama (Paus) atas kehidupan bernegara. Paus sebagai pemimpin tertinggi agama Nasrani, berperan kuat bahkan lebih berkuasa dari raja khususnya dalam menentukan kebijakan negara. Paus adalah pemegang otoritas tunggal dalam memaknai isi kitab suci sementara Raja kedudukannya tidak

lebih sebagai pelaksana fatwa Paus. Muncul dan berkembangnya aliran Protestan di Eropa abad pertengahan adalah bentuk manifestasi kegelisahan akibat krisis nilai atas perilaku Paus sebagai pemimpin tertinggi Agama Katolik yang berkedudukan di Roma yang dinilai jauh menyimpang dari nilai-nilai luhur agama (Encyclopedia Americana 22,h 680-684).

Di abad modern, banyak dijumpai pertikaian, penindasan dan pembantaian berlatar belakang agama yang diakibatkan oleh keyakinan bahwa semuanya dilakukan sebagai bagian dari misi suci agama yang dianut.

Beberapa negara lain di dunia yang kental dengan ajaran agamanya semisal negara Arab Saudi yang mayoritas adalah Islam (Sunni) yang menekankan Islam kembali ke ajaran yang fundamentalis dan mengutuk banyak kegiatan keagamaan yang menyimpang. Gerakan Muhammadiyah bin Abd al-Wahhab ini dikenal sebagai Mazhab Wahabbi. Jadi ajaran Wahabbi ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan bangsa dan negara Arab Saudi pada umumnya. Negara ini menganut sistem pemerintahan yang kerajaan (monarki) dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja yang berasal dari keturunan keluarga Ibnu Saud. Negara lain semisal Vatikan, yang masih merupakan areal komunitas Roma, merupakan negara kecil dimana pendiriannya semata-mata untuk kepentingan eksistensi agama Khatolik, di mana Paus sebagai kepala negara yang mempunyai kekuasaan penuh dalam eksekutif dan legislatif, sedangkan pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh komisi Kardinal atas pengangkatan Paus. Negara itu tetap memahami bahwa antara negara dan agama harus dipisahkan.

Dari beberapa negara (Mauritania, Pakistan, Komoro, Arab Saudi, dan Vatikan) tersebut, masing-masing memiliki beberapa kemiripan dengan negara Iran dalam hal bahwa agama memiliki pengaruh dan andil dalam sistem politik dan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya.

Di dalam beberapa perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara, banyak tawaran wacana pemikiran yang cocok untuk diterapkan dalam negara misalnya, sistem demokrasi yang menurut para pemikir dan pakar lebih baik dari komunisme dan kapitalisme dan menjadi rujukan oleh beberapa negara dunia saat ini untuk diterapkan. Demokrasi menjadi pilihan sistem ideal yang banyak digunakan oleh beberapa negara di era moderen dan menganggap bahwa negara agama tidak mungkin menciptakan sistem demokrasi. Namun, dari berbagai tawaran formulasi wacana, Iran tetap berpegang pada negara agama (Teokrasi) dan ajaran Islam (Syiah) sebagai ideologi negara. Slogan *Vox Dei*, *Vox Populi* (suara Tuhan adalah suara rakyat) adalah slogan yang dipakai oleh negara Iran.

Sejarah keberadaan sistem pemerintahan Islam Iran tidak lepas dari sejarah perjuangan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang ulama besar, Ayatullah Rohullah Khomeini yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, seorang Imam yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang telah terkikis oleh rezim kediktatoran dinasti Pahlevi dan penindasan oleh negara lain.

Model pemerintahan Islam seperti Iran pernah diterapkan dan dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW dan di masa para Khulafah Rasyiddin, di mana Nabi SAW dan para penerusnya menjadi seorang Imam dan sekaligus pemimpin pemerintahan di masanya. Pemerintahan tersebut dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga pemahaman terhadap Islam tidak hanya terbangun pada tingkat individu tetapi juga pada konteks sebuah masyarakat (negara) demi tetap tagaknya syariat Islam.

Iran adalah suatu negara yang dilihat dari sejarah keberadaannya merupakan negara monarki yang dipimpin oleh seorang presiden diktator Reza Shah yang berkuasa dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemerintahan yang dipegang dan dijalankan oleh se-

orang diktator tersebut menyebabkan penduduk Iran mengalami kesengsaraan, dimana rakyat diperbudak untuk kepentingan sang penguasa yang bekerjasama dengan negara Amerika Serikat.

Otoritas politik dan kekuatan Dinasti Pahlevi yang mempunyai angkatan bersenjata yang cukup kuat serta didukung Amerika Serikat sebagai negara adikuasa akhirnya runtuh juga melalui revolusi. Di samping ideologi dan kepemimpinan Khomeini, tidak dapat diabaikan bahwa sepanjang berkuasanya Dinasti Pahlevi yang represif telah memunculkan kekuatan-kekuatan oposisi terhadap kekuasaannya. Menurut Eef Saifullah Fatah, oposisi berfungsi menggambarkan pada khalayak kekeliruan-kekeliruan itu sambil membangun pertentangan dan perlawanan atasnya. Kelompok-kelompok oposisi tersebut diantaranya kelompok mahasiswa, elite-elite politik dan partai-partai yang bergerak di bawah tanah (Fron Nasional, Partai Tudeh, Gerakan pembebasan Iran dan Partai Sosialis) serta daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan Dinasti Pahlevi.

Di bawah Shah, Iran pada mulanya sebuah monarki konstitusional namun setelah tahun 1953 menjadi monarki absolut. Pemerintahan dibentuk oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang diangkat oleh Shah. Parlemen menganut sistem dua kamar (bikameral), mejelis rendah (majelis) yang dipilih melalui suatu pemilihan umum dan majelis tinggi (senat) yang diseleksi oleh Shah. Di bawah sistem monarki tersebut terdapat parlemen, pemerintah, dan partai politik namun Shah menjadi kekuatan politik yang paling dominan. Shah dapat membubarkan parlemen, pemerintah, maupun partai-partai politik sekehendaknya. Pada tahun 1978-1979, kaum Mullah yang membangun basis-basis kekuatan mereka melalui mesjid dan madrasah yang menjadi motor penggerak bagi demonstrasi anti Shah yang dipimpin oleh Ayatullah Rohullah Khomeini

berhasil merobohkan kekuasaan monarki Shah.

Keberhasilan revolusi Iran tak terlepas dari Ideologi yang dianut mayoritas rakyat Iran sebab ideologi merupakan aspek yang cukup signifikan dalam proses perubahan. Tesis ini didukung oleh pendapat Ali Syariati bahwa perubahan dalam sejarah peradaban manusia dimotori oleh ideolog-ideolog besar. Kalau kita memakai istilah konsep hegemoni integral Gramsci maka ideologi revolusi berhasil menjadi pemersatu dalam menumbangkan rezim yang masih berkuasa. Ideologi yang dianut salah satu kekuatan politik berhasil memenangkan konsensus di antara para kontestan dalam melawan penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ali Syariati berhasil menjelaskan tentang tawaran Islam dalam menghadapi tiga malapetaka yang muncul, yang menjadi musuh besar Islam yaitu keganasan kapitalisme, kejemuan marxisme dan kerancuan eksistensialisme, Islam menempatkan manusia di alam ketauhidan yang di dalamnya manusia dan alam, berada dalam keserasian dan mempunyai makna. Pandangan Islam yang pada gilirannya dapat difungsionalisasikan menjadi sebuah pandangan hidup atau ideologi yang mampu menggerakkan masyarakat.

Ideologi Islam di Iran yang menggerakkan revolusi tidak dapat dilepaskan dari Mazhab Syiah yang merupakan mazhab anutan terbesar dalam masyarakat Iran. Negara Iran satu-satunya negara di dunia dimana sekitar 92,8 persen rakyatnya menganut Mazhab Syiah. Ideologi tidak terlepas dari perjalanan historis dan doktrin Syiah yang berakar dan berkembang di Iran. Tradisi perjuangan Syiah melawan penindasan, cengkeraman kekuasaan politik dan agama memang menjadi fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Di samping itu pandangan politik Syiah memandang bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, maka kepemimpinan untuk sementara dipegang oleh ulama. Bahkan secara tegas menganggap bahwa antara agama dan politik

tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, sudah jelas menggambarkan bahwa ideologi dalam menggerakkan perubahan menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

Menurut Huntington, kasus-kasus terjadinya perubahan rezim dalam sejarah juga tidak selalu dapat dimasukkan secara rapih kedalam kategori-kategori teoritis. Hal inilah yang menjadi kesulitan dalam membahas perubahan-perubahan politik terkhusus revolusi. Setiap peristiwa revolusi mempunyai sejarah dan khasnya tersendiri, kemungkinan melahirkan teori baru terbuka untuk itu. Revolusi Islam Iran merupakan salah satu perubahan politik atau transisi yang berbeda dengan pergantian rezim atau transisi di negara-negara lain. Iran yang menjadi negara pertama melaksanakan suatu perubahan politik dari sistem politik monarki ke sistem Republik Islam.

Struktur pemerintahan Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak berakhirnya kekuasaan Shah. Bentuk negara berubah dari monarki absolut menjadi sebuah republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam dengan sistem Wilayah al-Faqihnya. Dengan berdirinya pemerintahan Islam ini telah menggugurkan beberapa pemikir yang mengatakan; agama tidak bisa membawa perubahan sosial dan mencampuri urusan negara (Karl Marx) dan "Hanyalah proletarlah yang secara langsung tertarik dalam ambil bagian dalam revolusi samapi akhir, bisa dan semestinya menjadi pemimpin dalam revolusi demokrasi-borjuis pada masa imprealisme. Dalam luhak revolusi, proletariat pada tahap pertama mengusung perubahan demokrasi dan kemudian melanjutkan perubahan dari demokrasi ke revolusi sosialis" (Lenin dalam V.A Fanasyev, *Marxist Philosophy*, 1965:306). Lahirnya revolusi ini telah memperlihatkan kepada dunia akan kemampuan para pemimpin agama di dalam menggerakkan revolusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa agama memiliki andil besar dalam membentuk sistem pemerintahan ne-

gara. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melihat pengaruh agama dalam sistem pemerintahan negara dengan mengemukakan judul “ Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian deskriptif eksplanatif. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan kedudukan para faqih (Ulama) dalam sistem pemerintahan islam iran, peran dan kedudukan seseorang dalam sistem pemerintahan ditentukan oleh bangunan filosofi dan tujuan sebuah negara, pola hubungan pemerintahannya, bentuk negara dan pemerintahannya, sejarah perjuangan negara, kondisi negaranya, dan bangunan masyarakatnya.

Konsep kebaikan bersama (Public Good), secara alamiah, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia dalam hidupnya senantiasa membutuhkan orang lain. Ketergantungan kepada orang lain mendorong manusia untuk hidup bersama. Kehidupan bersama merupakan perwujudan atas ketergantungan kepada orang lain. Dalam artian manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Keterbatasan kemampuan manusia adalah faktor lain yang menggerakkan untuk memahami pentingnya kebersamaan. Kehidupan bersama akan selalu mengarah kepada kebaikan bersama.

Dalam kehidupan bersamanya, manusia secara personal memiliki beberapa hak privasi yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia lain yang di sebut dengan hak alamiah manusia, hak yang daulat bagi setiap manusia. Dimana hak daulat itu merupakan hal

yang inheren pada manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai pencipta yang tidak bisa dihapuskan dan diambil oleh orang lain. Hak dasar ini, menjadi hal yang penting dalam kehidupan bersama. Kebutuhan manusia akan manusia yang lain menjadikan hak-hak privasi tersebut harus dibatasi demi kebaikan bersama.

Hubungan agama dan Negara, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.

Sintesis politik dan islam, penantian yang paling mendasar dari pemerintahan religius dan tugas yang paling besar dari pemerintahan ini adalah pelaksanaan undang-undang Ilahi. Tugas khusus dari pemerintahan religius, di mana hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan nonreligius adalah hal tersebut. Undang-undang yang ada dalam pemerintahan nonreligius adalah undang-undang insani (hasil kesepakatan manusia), di mana dalam pemerintahan religius undang-undang itu merupakan sesuatu yang suprain-sani dan Ilahi.

Wilayatul al faqih sebagai sistem politik dan pemerintahan, doktrin wilayat al-faqih merupakan poros sentral dari pemikiran politik Syi'ah kontemporer. Wilayah al-faqih merupakan personifikasi kekuasaan negara dalam sistem teokrasi Iran. Wilayah al-faqih pada dasarnya mirip dengan kekuasaan para Paus di Roma. Doktrin ini mengadopsi sebuah sistem politik yang berbasiskan perwalian, yang bersandar pada seorang faqih yang adil dan kapabel untuk memegang pemimpin pemerintahan selama gaibnya Imam yang maksum. Akan tetapi, meskipun perwalian dari seorang ulama agung diakui secara universal di antara semua teori-teori pemerintahan Syi'ah, terjadi ketidaksepakatan pada de-

tail-detailnya, seperti besarnya peranan faqih dan luas cakupan otoritasnya.

Lahirnya wilayah al-Faqih, dewasa ini terutama setelah revolusi Islam Iran yang menumbangkan kekuasaan Reza Syah, banyak orang yang bertanya-tanya tentang madzhab Syi'ah yang dianut oleh mayoritas penduduk Iran. Pertanyaan yang diajukan biasanya antara lain: "Apa sebenarnya madzhab Syi'ah itu, dan apa perbedaan prinsipil antara madzhab Syi'ah dengan Sunni". Pada hakekatnya perbedaan prinsipil antara Syi'ah dan Sunni terletak pada persoalan penerus dan pemimpin umat sepeninggal Nabi Muhammad saw. Kaum Syi'ah berpendapat bahwa pemegang jabatan itu telah ditetapkan dan diwasiatkan oleh Nabi saw, dalam hal ini yang ditunjuk adalah Khalifah Ali ibn Abi Thalib, sedangkan Sunni berpendapat bahwa Nabi SAW wafat tanpa mewasiatkan jabatan tersebut kepada siapa pun.

Terminologi wilayah al-Faqih, secara etimologis, kata wilayah merupakan bentuk lain dari turunan kata kerja "wala-wali wilayah", yang bermakna: hubungan dekat, persamaan dan pertalian. Kemudian dari kata kerja ini menurunkan kata 'wali' yang berarti: sahabat, pendukung, pengikut setia, tetangga, sekutu, pengurus, pecinta dan lain-lain yang sama dengan makna itu. Berkaitan dengan pengertian wilayah, al-Raghib al-Ishfahani menjelaskan bahwa kata 'wilayah' memiliki arti pertolongan, sedangkan kata 'walayah' memiliki arti pemimpin, pengatur, dan penanggungjawab suatu pekerjaan". Tetapi, sebagian pakar bahasa berpendapat bahwa kedua kata tersebut memiliki pengertian sama, yaitu pemimpin, pengelola, pengatur, dan penanggungjawab suatu pekerjaan.

Islam (Syiah) sebagai gerakan politik, pada mulanya untuk sebuah kurun waktu yang cukup lama, gerakan Syi'ah dapat dikatakan hanya sebagai gerakan protes politik saja, tetapi kemudian, paham ini membentuk teologi dan sistem agama, sosial dan politik. Dalam hubungan dengan sejarah modern, mun-

culnya kelompok Syi'ah yang cukup signifikan dan menentukan, baru terjadi ketika Dinasti Safawi (1502-1723 M) naik menjadi penguasa di Persia, dan menjadikan madzhab Syi'ah sebagai agama resmi negara. Kemudian para pemuka kelompok Syi'ah berhasil mendapatkan eksistensi yang berdiri sendiri, sehingga mereka dapat memainkan peranan yang cukup penting dalam negara.

Peran dan Kedudukan faqih dalam sistem pemerintahan Islam Iran, para mulla memainkan peran aktif dan konstruktif baik dalam kemenangan dan implementasi Republik Islam dan juga dalam perjalanannya menuju kesempurnaan dan kemajuan republik.

Pada abad-abad terakhir, pelbagai gerakan dan kebangkitan Islam terjadi secara berulang di dunia. Pada galibnya, para mullah memainkan peran aktif dan efektif dalam setiap perjuangan dan pergerakan Islam. Namun dalam gerakan Islam masyarakat Iran yang bermula pada permulaan tahun empat puluh (Syamsiah), ulama dan mullah Syi'ah berada pada jajaran puncak yang memimpin perlawanan.

Terlepas dari itu, dari kepemimpinan khusus Imam Khomeini R.a yang berada pada puncak proses politik ini, terdapat unsur-unsur politik lainnya dari kaum mullah yang turut memainkan peran yang luas. Selepas kemenangan Revolusi Islam dan terbentuknya pemerintahan Islam, peran para mullah sangat berpengaruh dalam memajukan dan mengawal pemerintahan Islam. Mengingat pemerintahan Iran adalah pemerintahan Islam maka terdapat dua faktor penting dalam pemerintahan ini. Pertama berbentuk republik dan kedua bercirikan Islam.

Dengan memperhatikan bahwa mayoritas para pakar agama Islam di Iran berkedudukan sebagai mullah dan ulama, maka sudah barang tentu mereka memiliki kedudukan penting dan tiada banding dalam sistem pemerintahan Islam Iran.

Dr. Behesyti terkait dengan peran para mullah dalam kemenangan Revolusi Islam

meyakini bahwa pada masa Revolusi Islam dan pada masa yang berkelanjutan antara tahun 1341 sampai 1357 S (1963-1979 M) para mullah secara perlahan memasuki medan, sebagian mereka melaju dan lebih cepat memasuki medan perjuangan. Terdapat juga beberapa orang yang mengikuti mereka terjun ke dalam medan perjuangan. Dan pada tahun 1357 (1979) kebanyakan masjid-masjid berubah menjadi basecamp dan pangkalan perjuangan dan perlawanan.

Pasca kemenangan Revolusi Islam tugas para mullah semakin berlipat ganda karena pasca kemenangan Revolusi Islam mereka mengemban tugas untuk memajukan dan berupaya maksimal mengantarkan pemerintahan Islam meraih cita-cita ideal masyarakat Islam.

Untuk mendirikan sebuah pemerintahan Islam maka pertama-tama aturan-aturan Islam harus diratifikasi dan kemudian diimplementasikan dengan menggunakan metode yang terbaik. Jelas bahwa untuk meratifikasi konstitusi Islam, diperlukan para pakar dan ahli yang mengetahui dengan baik hukum-hukum agama dan setiap dimensi agama sehingga mampu meratifikasi undang-undang dan konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara umum, para ulama Syi'ah tersebut sepakat bahwa otoritas untuk mengatur dan membimbing umat Islam, baik masalah spiritual maupun dunia, diberikan sepenuhnya kepada faqih yang sudah memenuhi kualifikasi selama Imam Zaman masih ghaib, sehingga keadaan umat menjadi aman, tentram, sejahtera dan penuh dengan keadilan.

Ada beberapa istilah yang dilekatkan pada para faqih berdasarkan peran dan kedudukannya dalam konsep Wilayah al-Faqih, dalam artian tentang kedudukan marja'iyah dan mujtahid, dan tentang jangkauan kewenangan itu di luar batas geografis sebuah masyarakat yang secara struktural berada di dalam sistem Wilayah Faqih, tentang pola hubungannya yang bersifat struktural insti-

tusional ataukah semata kultural spiritual dan sebagainya.

Peran dan kedudukan bersama (common) para faqih dan masyarakat, setelah ratifikasi final undang-undang maka tiba gilirannya masalah eksekutif dan operasional pemerintahan dalam masyarakat Islam. Dalam domain ini, para mullah juga seperti warga masyarakat lainnya dapat memangku jabatan dan mengisi pos-pos tertinggi operasional penyelenggaraan negara apabila memenuhi syarat-syarat. Pos-pos tersebut adalah presiden (eksekutif) dan ketua Majelis khubregan (legislatif). Karena dalam implementasi undang-undang baik para mullah demikian juga warga masyarakat secara umum dapat memainkan peran aktif dan konstruktif serta memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dengan menjadi presiden atau ketua Majelis khubregan.

Analisis Hubungan Antara Agama Dengan Peran dan Kedudukan Para Fuqaha dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

Hasil kajian tentang adanya hubungan agama dengan peran dan kedudukan para fuqaha di Negara Republik Islam Iran sebagaimana pada rumusan masalah yang pertama menjelaskan adanya hubungan antara agama dan peran dan kedudukan para fuqaha yang terlihat dengan konsep wilayah al-faqih yang dipakai oleh Negara Iran sebagai sistem politiknya. Pada pasal 5 UUD RII menyebutkan bahwa: "Selama ketidakhadiran Imam yang keduabelas (semoga Allah mempercepat kedatangannya) dalam Republik Islam Iran, wilayah dan kepemimpinan umat merupakan tanggung jawab dari orang faqih (ahli hukum agama) yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberani, giat dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas umat sebagai imam (pemimpin) mereka. Apabila faqih semacam itu, suatu dewan pimpinan yang terdiri dari para fuqaha yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas akan memegang tanggung jawab ini.

Kududukan Lembaga Negara Republik Islam Iran Dalam Trias Politika, struktur politik meliputi, baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia, maupun struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik dapat merupakan bangunan politik yang nampak secara jelas dan konkrit. Dalam kaitan dengan struktur politik ini, negara Islam adalah negara hukum, yang penyelenggaraan negara memerlukan struktur institusi-institusi politik kenegaraan secara hierarkis, agar penyelenggaraan negara selaras dengan tujuan pembentukan negara. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional yang merujuk kepada hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Alqur'an dan hadist, karena Allah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, disamping pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya, bukan parlemen yang dihuni oleh berbagai kepentingan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Samuel (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: Rineka Cipta.
- Aceh, Abu Bakar.1998.Syi'ah Rasionalisme dalam Islam. Solo:Ramadhani
- Ali Engineer, Asghar. 1993. Islam dan Pembebasan.Yogyakarta: LKiS
- Anreski, Stanislav.1989. Max Weber : Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama.Yogyakarta:PT.Tiara Wacana Yogya
- Anwar, M.Syafi'i.1995. Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia .Jakarta: Paramadina
- A.Piliang, Yasraf.2005.Transpolitika (Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas).Yogyakarta:Jala Sutra
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Ata Ujan, Andre.2001. Keadilan dan demokrasi; telaah filsafat politik John Rawls (seri filsafat atmajaya:23).Yogyakarta: Kanisius
- Budiardjo, Miriam.2004.Dasar Dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rachman, Budhy-Munawar.2010. Memberla Kebebasan Beragama (percakapan tentang Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme). Jakarta Selatan: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Buku (1) dan (2)
- Dahl, Robert A..1985. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, trj. Sahal Simamora.Jakarta: Rajawali Press
- Haidar, Hadji, Hamid.2006. A Theory Religious Democracy.Jakarta:ICAS Press
- Hashem, O.1989.Saqifah, Awal Perselisihan Umat.Jakarta: Yapi
- Hassan, Riaz.1985.Islam: Dari Konservatisme sampai Fundamentalisme .Jakarta: Rajawali Press
- Hatta, Mohammad .2002. Sosialisme Religius (suatu jalan keempat). Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Hatta, Mohammad .2008. Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat). Bandung: SEGA ARSY
- Huwaidy, Fahmi.1996. Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, terj. Rahmani Astuti,Bandung: Mizan
- Ihza Mahendra,Yusrl.1999. Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam. Jakarta: Paramadina
- Jindan, Ibrahim, Khalid. 1999.Teorii Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti
- Khamenei, Ali.2005.Perang Kebudayaan.Jakarta: Cahaya
- Khumaini, Imam.2002. Sistem Pemerintahan Islam. Jakarta: Pustaka Zahra
- Khumaini, Imam.2010. Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan (Konsep Wilayahul

- Faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam). Jakarta: Shadra Press
- Labib, Muhsin.2010.Sejarah Dan Hirarki Fakihi.Jakarta: AL-HUDA
- Latif, Yudi .2011. Negara Paripurna (Historisasi ,Rasionalitas, Aktualitas Pancasila).Jakarta: PT.Gramedia
- Legenhausen, M.2010.Pluralitas dan Pluralisme Agama.Jakarta: Shadra Press
- Mallat, Chibli. 2001.Menyegarkan Islam. Bandung: Mizan
- Musawi, A.Syarafuddin.1990.Dialog Sunnah-Syi'ah, terj. Muhamamad Baqir, Bandung: Mizan
- Muthahhari, Murtadha. 1990. Masyarakat dan Sejarah, terj. M. Hashem.Bandung: Mizan
- Mutahhari, Murtadha .1992. Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, terj. Agus Efendi.Bandung: Mizan
- Mulyadi, Deddy .2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Najjar, Fauzi M.1990. Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam.AL-Hikmah
- Najaf L, Akbar.1990. Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini (Sstudi Atas Teori Politik Islam dari Fiqh Politik ke Teologi Politik). Jakarta: Shadra Press
- Priyono, B.Herry.2003.Anthony Giddens Suatu Pengantar.Jakarta: KPG
- Raharjo, Dawan .2002. Islam dan Transformasi Budaya. Yogyakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa
- Rahmat, Jalaluddin. 1998.Islam Alternatif. Bandung: Mizan
- Ranadireksa, Hendarmin.2007.Arsitektur Konstitusi Demokratik. Bandung: Fokus Media
- Robert, Robertus.2010. Manusia Politik: Subyek radikal dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global menurut Slavoj Zizek.Tangerang: Marjin Kiri
- Sihbudi, M. Riza.1993.Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayah al-Faqih,makalah seminar,Jakarta Surabaya, Ramlan.2007.Memahami Ilmu Politik.Jakarta: PT Grasindo
- Suleman, Zulfikri.2010.Demokrasi Untuk Indonesia (Pemikiran Politik Bung Hatta).Jakarta : PT.Kompas Media Nusantara
- Shadr, Baqir, Muhammad.2001. Sistem Politik Islam.Jakarta: Lentera
- Syafiie, Kencana, Inu..2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan.Bandung: PT Refika Aditama
- Syafiie, Kencana, Inu,Azikin.2007.Perbandingan Pemerintahan.Bandung: PT Refika Aditama
- Tehrani, Hadavi, Mehdi. 2005. Negara Ilahiah.Jakarta: Al-Huda
- Ubaedillah, Rozak A .2008 .Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Edisi Ketiga.Jakarta:ICCE UIN Jakarta
- Varma, SP.2003.Teori Politik Modern.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yamani. 2002. Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam.Bandung: Mizan
- Yazdi, Taqi Misbah, Muhammad.2003. Sekilas Tentang Filsafat Politik Islam, dalam Jurnal Al-Huda, Vol III
- Yazdi, M.T. Misbah. 2006. Freedom: Bebas Terpaksa atau Terpaksa Bebas.Jakarta: al-Huda
- Yuda, Hanta .2010. Presidensialisme Setengah Hati (dari dilema ke kompromi).Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama
- [Http://deparry.blogspot.com/2009/02/pemikiran-politik-thomas-hobbes.html](http://deparry.blogspot.com/2009/02/pemikiran-politik-thomas-hobbes.html)
<http://politeiapress.blogspot.com>

www.bartleby.com/rafsanjani-hashemi
www.Islam Quest.com
www.wikipedia.org/wiki/laman.utama

Metro TV (dialog is Today) (Polemik Peran Agama dan Negara; pembicara :Lutfi Asyukani, Anis Matta, Bachtiar Effendi), tanggal 7 september 2011 jam 22.00

TV One (Biografy Imam Khomaini), tanggal 2 september 2011 jam 22.00